

Mutasi, Sinyal Sukses di Tubuh Polri?  
Sederet Loyalis Jokowi Tersandung Hukum, Bersih-bersih Era Prabowo?

fanzine

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

# *Invisible Hand* di Balik Kerusuhan Agustus 2025

Edisi September 2025

TEMUKAN INFORMASI DAN BERITA ANALISIS MENDALAM HANYA DI  
WEBSITE BERITA NASIONAL :

# aktual

TERHANGAT TERPERCAYA

MENYAJIKAN INFORMASI, PERISTIWA, DAN ANALISA POLITIK,  
HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SETIAP SAAT  
MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI ANDA GUNA MEMBANTU  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG TEPAT DAN STRATEGIS

PARTNERSHIP : 813-1019-7365

Pengamat Kritis Gaji DPR  
Masih Rp65 Juta Meskipun  
Tuntutan Demonstrasi Besar  
Disepakati

Oleh Eka Permadi  
WIB

Was-was Antikrimaks Kasus  
Nadiem Makarim di Kejagung

Kasus Tameng  
Kantong Gaji Rp65 Juta  
Rinciannya  
7 September 2015

# Huru-Hara Agustus Kelabu

Edisi majalah kali ini disusun dengan benang merah yang jelas, membaca ulang kerusuhan Agustus 2025 dan implikasinya bagi politik, keamanan, serta arah bangsa. Rubrik Laput menyoroti “Invisible Hand” dan penumpang gelap di balik amok Jakarta, sementara Lapsus mengupas bagaimana reformasi Polri yang tertunda serta manuver mutasi membuka ruang spekulasi soal suksesi. Analisis menegaskan dimensi lain, bahwa media sosial sebagai jalur masuk penunggang gelap, dan politik yang tak kalah destruktif dari sekadar kerusakan fisik.

Rubrik Nasional melengkapi potret besar dengan sorotan terhadap loyalis Jokowi yang tersandung kasus, serta narasi bersih-bersih di era Prabowo. Sementara Dunia Aktual menegaskan pergeseran geopolitik Indonesia ke Timur, dan Oase menghadirkan refleksi moral tentang basis sosial Islam ketika negara kehilangan suara. Semua rubrik saling terhubung, memperkuat tafsir krisis, kecuali laporan hasil Pilkada Ulang Pangkalpinang yang hadir sebagai catatan tersendiri dari Nusantara.

Selamat menikmati sajian Aktual...

## Daftar Isi

### Laporan Utama

- The Invisible Hand di Balik Amok Jakarta 4
- Memburu Dalam: Penumpang Gelap di Balik Kerusuhan Jakarta 8
- Di Balik Kerusuhan Agustus 2025, Prabowo Dikepun Para Mafia-Konglo 14

### Laporan Khusus

- Reformasi yang Tertunda dan Persaingan Elit, Mempercepat Delegitimasi Polri 20
- Polri Superbody Tanpa Pengawasan, ICJR Desak Reformasi Mendesak 24
- Mutasi, Sinyal Suksesi di Tubuh Polri? 20

### Analisis

- Kerusuhan Agustus 2025: Penunggang Gelap Demontrasi Menyelinap Lewat Media Sosial 30
- Raya Tidak Mati karena Cacing, Tapi karena Politik 34

### Nusantara

- Prof Saparudin-Dessy Ayutrisna Menang Telak Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025 36

### Nasional

- Sederet Loyalis Jokowi Tersandung Hukum, Bersih-bersih Era Prabowo? 38
- Kosmas K. Gae Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat Akibat Tabrak Affan Kurniawan 40
- Kapuspen TNI Ungkap Massa Anarkis Sudah Terlatih 41

### Dunia Aktual

- Dua Panggung, Satu Pesan: Indonesia Bergerak ke Timur 42

### Oase

- Islam Sebagai Basis Sosial dan Moral: Ketika Negara Kehilangan Suara 45

**aktual.com**  
TERHANGAT TERPERCAYA

**Direktur Utama:** Andy Abdul Hamid **Pemimpin Umum:** Tino Oktaviano **Pimpinan Redaksi:** M Malik **Redaktur Investigasi:** Eka Permadhi **Redaktur Fanzine:** Andry Haryanto **Redaktur Medsos:** Al Jalil **Redaktur Videografis:** Saiful **Redaktur:** Indra Bonaparte **Reporter:** Rizky Zulkarnain, Sandi Setyawan, Muhammad Khamdi (Pantura Pekalongan) **Reporter investigasi:** Eroby Jawi Fahmi **Kontributor:** Firgi Erliansyah, Nugroho Sentoso, Halimansyah, Danang Wibowo, Ronaldo Jerry, Hary Fauzan (Bekasi), Muhammad Aderman (RIAU), Ferry Sapto (Batam) **Head Marketing:** Almalludin Sudrajat Muchlica **IT:** Rohadi M Raja **Legal Officer:** DAAR AFKAR & CO. LAWYERS

**Alamat Redaksi:** Caprof Building Jl. Prof DR Soepomo No. 73B Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan **Telepon** (021) 83706200 **E-mail:** redaksi@Aktual.com iklan@Aktual.com





# *The Invisible Hand* di Balik Amok Jakarta





foto: Tino Oktaviano/aktual.com

**K**erusuhan yang melanda Jakarta dan sejumlah daerah pada 28–30 Agustus 2025 mengguncang stabilitas nasional dan memunculkan pertanyaan tentang aktor tak kasatmata di baliknya. Aksi protes yang awalnya menuntut pembatalan tunjangan perumahan fantastis bagi 580 anggota DPR, Rp50 juta per bulan, hampir 10 kali lipat upah minimum Jakarta, berubah menjadi gelombang kericuhan massal

Di Senayan, demonstrasi damai pada 28 Agustus seketika pecah setelah aparat menembakkan gas air mata, memicu bentrokan meluas hingga pembakaran fasilitas umum. Puncaknya, Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di tengah kekacauan malam itu.

Tragedi ini menyulut amarah publik dan solidaritas luas. Keesokan harinya ribuan mahasiswa dan pengemudi ojol mengepung Mapolda Metro Jaya menuntut keadilan, dihadang barikade aparat bersenjata dan tembakan gas air mata. Gelombang protes serupa menjalar ke Bandung, Makassar, Yogyakarta, Solo hingga Surabaya, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap arogansi DPR dan aparat kepolisian.

Kerusuhan tiga hari tersebut membawa korban yang tidak sedikit. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

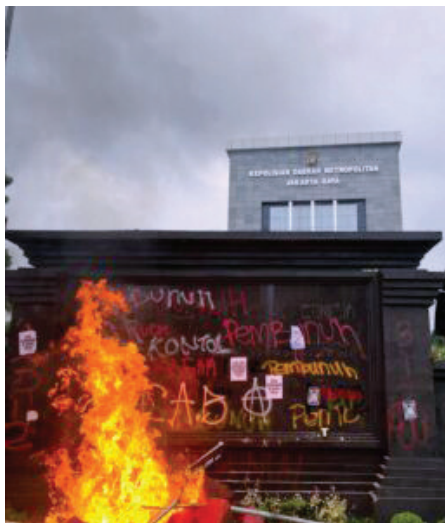


foto: Raffi/aktual.com

mencatat 716 orang menjadi korban dalam kerusuhan ibu kota. Dinas Kesehatan DKI melaporkan 469 orang harus mendapat pelayanan medis (371 rawat jalan, 97 rawat inap) dan 1 orang meninggal dunia akibat insiden di Jakarta. Secara nasional, tujuh orang tewas di Jakarta, Makassar, Solo, dan Yogyakarta.

Kerusakan infrastruktur pun parah. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kerugian fasilitas umum di Jakarta mencapai Rp55 miliar, antara lain halte bus TransJakarta, sarana MRT, dan CCTV yang dirusak massa.

Ribuan peserta aksi ditahan. Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang selama unjuk rasa, dari total 3.195 orang yang diamankan polisi di 15 provinsi. Komnas HAM mengancam keras insiden kekerasan aparat hingga



foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/pri

jatuhnya korban jiwa.

“Komnas HAM mengancam tindakan oknum polisi yang brutal sehingga hilangnya nyawa,” ujar Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

Menanggapi situasi genting tersebut, pemerintah bergerak cepat. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Negara, 31 Agustus 2025, menegaskan negara menghormati aspirasi murni dan hak demonstrasi damai, namun memperingatkan tegas terhadap tindakan anarkis yang mengarah pada kudeta.

“Aspirasi murni harus dihormati. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ujar Prabowo

Presiden memerintahkan TNI-Polri bertindak tegas mencegah perusakan,





foto: aktual.com

penjarahan, maupun gangguan keamanan. “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya

Buntut aksi yang berujung kerusakan, pemerintah pusat bersama para ketua partai politik sepakat mencabut kebijakan tunjangan DPR yang kontroversial serta menonaktifkan anggota dewan yang ucapannya menyulut kemarahan publik.

Prabowo mengimbau masyarakat menjaga persatuan dan tidak terprovokasi pihak manapun.

“Indonesia berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu

domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, menjarah, atau membuat kerusakan,” tuturnya

Di sisi lain, tujuh anggota Brimob yang terlibat insiden tertabraknya Affan telah diperiksa dan dua di antaranya terancam sanksi pemecatan

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan penyesalan mendalam seraya memohon maaf atas jatuhnya korban sipil. “Saya sangat menyesali insiden yang terjadi, dan mohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa ini,” kata Listyo, Kamis (28/8/2025) malam.

Belasungkawa juga disampaikan langsung dengan kunjungan Presiden Prabowo ke keluarga almarhum Affan dan pemberian santunan. Langkah-langkah tersebut diharapkan meredakan situasi panas yang sempat mendorong wacana darurat militer.

Pengamat intelijen Wawan Purwanto menilai eskalasi kerusakan memang berbahaya, namun berharap kondisi bisa ditangani tanpa perlu tindakan militer ekstrem.

“Status darurat militer bisa saja terjadi jika eskalasi terus berlanjut, namun belum perlu, masih bisa diatasi dengan standar umum. Militer memback wup Polri. Ini sinergi yang baik,” pungkas Wawan, seraya mengingatkan semua pihak menahan diri demi memulihkan stabilitas keamanan nasional dengan tetap menjunjung HAM.

*Rizky Zulkarnain, Eka Permadi, Erwin C*

*Sihombing, Elroby Jawi Fahmi, Rizky Zulkarnain*

# Memburu Dalang: Penumpang Gelap di Balik Kerusuhan Jakarta







**D**i tengah upaya penanganan, mengemuka dugaan bahwa kerusuhan ini 'ditunggangi' oleh kekuatan tersembunyi.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleman B. Ponto secara blak-blakan menyatakan rangkaian demonstrasi brutal akhir Agustus sudah pasti ditunggangi.



Aksi yang berlangsung serentak dan menyerang kantor polisi, gedung DPR/ DPRD hingga rumah pejabat menurutnya mustahil terjadi spontan tanpa provokasi terencana.

"Memanfaatkan situasi itu bukan hal yang luar biasa, itu biasa. Justru menjadi luar biasa kalau tidak ada yang bermain," kata Ponto.

Meski demikian, ia mengingatkan akar masalahnya tetap pada krisis kepercayaan publik terhadap DPR dan Polri. Ponto menilai kemarahan rakyat dipicu kesenjangan kebijakan.

"Sekian tahun kita lihat Polri membuat undang-undang memperkuat diri, sementara DPR memperkaya diri. Rakyat malah tercekik. DPR harusnya memperjuangkan rakyat, malah joget-joget," tuturnya miris.

Kematian Affan menjadi pemicu yang mengakumulasi energi protes berbagai elemen masyarakat.

"(Kericuhan) itulah energi yang terakumulasi. Begitu ada pemicu lantas meluas," ujarnya

Artinya, gerakan ini berangkat dari kekecewaan nyata, namun diakui atau tidak, ada penumpang gelap yang ikut bermain di tengah kekisruhan tersebut.

Indikasi keterlibatan aktor-aktor terselubung juga disoroti oleh analisis lain. Wawan Purwanto menyebut arah kerusuhan sudah melampaui protes spontan, ada pihak yang sengaja membuat situasi tambah ramai dan ruwet dengan tujuan tertentu.

“Belakangan memang ada yang ikut bergerak untuk membuat situasi tambah ramai. Siapa mereka nanti juga akan ketahuan, yang jelas pergerakan seperti itu butuh logistik,” kata Wawan, seraya mengingatkan publik jangan mau diadu domba oleh kemungkinan skenario asing.

Peringatan serupa sebelumnya dilontarkan mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono, yang menurut

Wawan sudah mewanti-wanti adanya sinyal-elemen pihak asing terlibat dalam kerusuhan

Kecurigaan terhadap ‘invisible hand’ asing ini mengemuka karena pola kerusuhan dinilai terorganisir dan menyasar simbol negara. Presiden Prabowo sendiri mengaku mendapat laporan adanya upaya sistematis merusak simbol negara melalui infiltrasi anasir perusuh.

Ia mencontohkan banyaknya penyusup membawa bahan peledak dan molotov. “Di banyak tempat datang truk-truk berisi petasan besar. Ini sudah bukan demonstrasi, tapi perusuh,” tegas Prabowo, Senin (1/9/2025).

Presiden menegaskan bahwa gerakan yang merusak dan menyabot kepentingan rakyat jelas bukan aspirasi rakyat, tapi upaya merusak agenda bangsa. Pernyataan ini mengisyaratkan



Foto: aktual.com



keyakinan pemerintah bahwa ada agenda terselubung di balik aksi anarkis tersebut, di luar tuntutan sah masyarakat.

Isu intervensi asing pun mencuat dalam narasi berbagai media. Laporan media Rusia Sputnik secara eksplisit menuding miliarder George Soros berada di balik kerusuhan demonstrasi di Indonesia akhir Agustus

Laporan ini, yang mengutip analisis geopolitik Angelo Giuliano dan Jeff J. Brown, mengaitkan gejala di Indonesia dengan pola revolusi berwarna yang pernah terjadi di negara lain. Giuliano mencurigai kemunculan simbol bendera bajak laut “One Piece” di tengah aksi sebagai tanda keberadaan agenda eksternal

Dalam anime One Piece, bendera hitam tengkorak jerami melambangkan perlawanan terhadap tirani, simbol yang sejak Juli 2025 mulai muncul di berbagai demonstrasi di Indonesia. Giuliano menduga setidaknya dua aktor asing berperan.

Pertama, National Endowment for Democracy (NED) yang disebutkan telah mendanai sejumlah media Indonesia sejak 1990-an; kedua, Open Society Foundations milik Soros, yang aktif menggelontorkan dana miliaran dolar ke kelompok sipil.

Jika keterlibatan ini benar, kata Giuliano, tentu ada agenda tersembunyi bernuansa geopolitik. “Selain itu, ini terkait dengan fokus Indo-Pasifik baru-baru ini... mengisyaratkan motif geopolitik,”

ujarnya, merujuk pada ketegangan kawasan yang meningkat belakangan

Pengamat Jeff J. Brown, penulis *The China Trilogy*, bahkan secara lugas menyamakan krisis Indonesia 2025 dengan skenario Serbia. “Ini persis seperti yang terjadi di Serbia. G7 menginginkan diktator lain yang didukung Amerika Serikat, seperti Soeharto di masa lalu,” imbuh Brown dalam wawancara dengan Sputnik.

Ia menilai Prabowo Subianto tidak sejalan dengan agenda Barat karena mendekat ke Tiongkok, Rusia, SCO, dan terutama membawa Indonesia bergabung dengan BRICS

Dengan ekonomi Indonesia terbesar ke-8 dunia (PPP) dan populasi nyaris 300 juta jiwa, Brown menyebut Indonesia sebagai target yang sangat layak untuk diserang dengan revolusi warna yang direkayasa Barat.

Tuduhan ini, meski kontroversial, mengingatkan pada jejak panjang keterlibatan asing dalam politik Indonesia. Sejak era Perang Dingin 1970-an, bayang-bayang invisible hand asing kerap muncul di balik gejala domestik.

Mulai dari dukungan Barat terhadap rezim otoriter Orde Baru, krisis moneter 1997 yang diwarnai spekulasi asing, hingga pendanaan sejumlah lembaga. Kini, di era rivalitas baru Timur-Barat, isu intervensi eksternal kembali menghantui, seolah mengulang pola lama dalam kemasan baru.

*Eka Permadi, Elroby Jawi Fahmi*

# TIMELINE & KERUGIAN AKIBAT KERUSUHAN AKHIR AGUSTUS 2025

## Jakarta, 29-30 Agustus 2025

- ⚠️ Bentrokan di beberapa titik.
- 🔥 **Kerugian Rp55 miliar** (TransJakarta 41,6M, MRT 3,3M, CCTV 5,5M).
- 🏠 Gerbang tol Slipi, Pejompong, Senayan, Semanggi, Kuningan, dan 7 halte terbakar.

## Jawa Timur, 29-30 Agustus 2025

- ⚠️ Gedung Grahadi, DPRD Kediri, Polsek Tegalsari, belasan pos polisi terbakar.
- 🔥 **Kerugian Rp124,25 M** (aset Polri), cagar budaya rusak! kerugian nasional Jatim tertinggi
- 👮 83 polisi terluka

## Makassar (Sulsel), 29 Agustus 2025

- ⚠️ Gedung DPRD Makassar dibakar
- 🔥 **Kerugian Rp253,4 M**
- 👮 3 tewas, 5 luka

## Bandung (Jabar), 29 Agustus 2025

- ⚠️ Wisma MPR RI dibakar, gedung DPRD Jabar diserang
- 🔥 **Kerugian Rp10 M** (estimasi)  
Bangunan pemprov & DPRD rusak





### **Pontianak (Kalbar), 29 Agustus 2025**

- ⚠️ Pos polisi & fasum dirusak
- 🔥 Kerugian belum diumumkan
- 👮 Puluhan orang diamankan

### **Cirebon (Jabar), 30 Agustus 2025**

- ⚠️ Gedung DPRD Kabupaten dibakar & dijarah
- 🔥 **Kerugian Rp10,49 miliar** (DPRD)
- + **Rp492,9 juta** (DLH)
- 👮 28 tersangka

### **Surakarta (Jateng), 30 Agustus 2025**

- ⚠️ Gedung DPRD rusak
- 🔥 **Kerugian Rp13,8 miliar**

### **Pekalongan (Jateng), 30 Agustus 2025**

- ⚠️ Bangunan Pemkot & DPRD terbakar
- 🔥 **Kerugian Rp100 miliar** (awal)
- Relokasi layanan pemkot

### **Semarang (Jateng), 30 Agustus 2025**

- ⚠️ Gedung DPRD Jateng rusak
- 🔥 **Kerugian belum diumumkan**
- Inventarisasi berlangsung

### **Mataram (NTB), 30 Agustus 2025**

- ⚠️ Gedung DPRD NTB dibakar & dijarah
- 🔥 **Kerugian Puluhan miliar** (sementara)
- Gedung ludes terbakar

### **Bali (Denpasar), 31 Agustus 2025**

- ⚠️ Gedung DPRD Bali rusuh, pos polisi dirusak
- 🔥 **Kerugian belum diumumkan**
- 👮 10 luka
- 👮 138 ditangkap





# Di Balik Kerusuhan Agustus 2025, **Prabowo Dikepung Para Mafia-Konglo**



foto: aktual.com



ENTETAN kerusuhan nasional 28–31 Agustus 2025 bermula dari demonstrasi damai menolak tunjangan fantastis bagi anggota DPR RI. Rencana tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan yang hampir 10 kali lipat UMP DKI Jakarta memicu kemarahan publik.

Protes mahasiswa dan elemen masyarakat pada akhir Agustus itu adalah puncak dari kemarahan publik,

rasa frustrasi kolektif atas berbagai persoalan ekonomi, kesenjangan kelas sosial. Rakyat berjibaku dengan biaya hidup tinggi. Tapi diblain sisi, wakil rakyat menaikkan tunjangan.

Aksi yang dipicu isu tunjangan berlebih tersebut segera meluas. Demonstrasi awal pekan itu berujung kerusuhan pada 29 -30 Agustus setelah seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan tewas terlindas kendaraan polisi saat pengendalian massa





foto: Tino Oktaviano/aktual.com

Insiden tragis ini menyulut emosi massa, sehingga aksi protes di Jakarta dan berbagai kota berubah menjadi bentrokan disertai penjarahan rumah pejabat serta pembakaran gedung DPRD di daerah. Situasi pun kian tak terkendali, menorehkan korban jiwa dan luka, serta guncangan politik terbesar sejak 1998

Sejatinya, demonstrasi seperti biasa diawali oleh kelompok masyarakat sipil, kaum intelektual, dan mahasiswa yang murni menyuarakan aspirasi. Kelompok ini turun ke jalan didorong oleh idealisme dan kepedulian atas kebijakan DPR yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

Mereka memprotes privilese elit politik di tengah kesenjangan ekonomi yang nyata. “Kemarahan rakyat Indonesia sudah lama terakumulasi.

Viral video hanya menjadi percikan api, tetapi bahan bakarnya adalah ketidakadilan ekonomi dan perilaku korup pejabat,” tegas Arya Fernandes, pengamat politik dari CSIS.

Para mahasiswa pun menegaskan hal serupa. Koordinator pusat BEM Seluruh Indonesia, Muzammil Ihsan, menyebut pemotongan tunjangan DPR saja dianggap belum cukup, karena kemarahan di jalanan itu bukan tanpa sebab.

Dengan kata lain, elemen pertama ini lahir dari kegelisahan otentik atas kesewenang-wenangan elit, yang dipicu pula oleh simbol-simbol provokatif seperti joget riang anggota DPR di tengah derita rakyat. Aspirasi mereka jelas, menolak tunjangan tidak pantas dan menuntut empati serta keadilan kebijakan.

Namun ditengah jalan demonstrasi damai ini diinfiltrasi oleh setidaknya tiga kelompok yang memiliki berbagai tujuan berbeda. Mereka memanfaatkan kemarahan rakyat dengan target terjadi benturan antar pendemo dengan aparat.

Kelompok pertama, adalah oligarki atau elite ekonomi lokal yang diduga menunggangi momentum kerusuhan untuk agenda tersembunyi. Sejumlah analis menilai bahwa instabilitas yang terjadi dimanfaatkan oleh segelintir pemodal besar yang kecewa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka menilai pemerintah gagal menjaga iklim stabil bagi bisnis, sehingga mengambil kesempatan dalam krisis ini untuk mendelegitimasi kekuasaan yang ada. Khairul Fahmi dari ISESS mengingatkan bahwa di balik kerusuhan yang tampak spontan, ada elemen yang terencana dengan berbagai tujuan. Mulai dari penjarahan oportunistis hingga strategi menciptakan kekacauan untuk delegitimasi pemerintah secara menyeluruh

Kelompok oligarki ini berusaha menekan pemerintah Prabowo agar

mengubah kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan mereka. Terlebih dari bidang hukum yang dianggap mengganggu 'rantai bisnis' di mana pemerintah sedang unjuk gigi babad kelompok "serakahnomic".

"Demonstrasi bisa menjadi alat untuk menekan pemerintah agar mengubah kebijakan yang mengganggu bisnis. Dengan menyusut instabilitas, oligarki bisa memaksa pemerintah berkompromi," tulis pengamat politik Rokhmat Widodo



foto: csis.or.id

**"Kemarahan rakyat Indonesia sudah lama terakumulasi. Viral video hanya menjadi percikan api, tetapi bahan bakarnya adalah ketidakadilan ekonomi dan perilaku korup pejabat,"**

Dalam sejarah politik Indonesia, oligarki kerap bergerak sebagai bayang-bayang di belakang layar, menggerakkan operator lapangan atau ormas demi menjaga kepentingan mereka

Pada kerusuhan kali ini, para taipan yang kecewa diduga ikut bermain, misalnya karena kebijakan

ekonomi Prabowo yang tidak sejalan dengan ekspektasi mereka.

Dengan mendompleng aksi massa, mereka berharap kegaduhan ekonomi-politik akan melemahkan posisi pemerintah Prabowo, yang selanjutnya merugikan legitimasi rezim di mata publik maupun investor.

Kelompok kedua adalah



**“Kerusuhan diarahkan ke anarki. Tadinya *people power* yang damai, tapi kemudian dibelokkan agar menjadi huru-hara,”**

konglomerasi Barat (Amerika dan Eropa). Pengkaji geopolitik sekaligus Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, menegaskan ada aktor asing non-negara yang menjadi dalang di balik layar. Kerusuhan yang meletus, menurutnya, pada 28–29 Agustus 2025 dinilai bukanlah semata ledakan spontan masyarakat.

“Sosoknya itu *non-state actor*, jadi aktor tapi bukan negara, tapi punya pengaruh kuat entah ekonomi entah politik. Dan sifatnya *non-violence*,” ujar Hendrajit.

Menurutnya, pola intervensi ini sejalan dengan skema korporasi Barat yang secara historis kerap memanfaatkan masa transisi politik di Indonesia. “Kalau bicara 98 itu NDI terlibat, intervensi asing walaupun nggak ada sosok tapi dengan dua organ ini sudah gambaran korporasi main,” beber Hendrajit.

Kini, jaringan tersebut disebut beroperasi melalui Kementerian

Kuangan dan BUMN dan konglomerasi lokal, untuk menjaga dominasi ekonomi mereka. Dia menilai kebijakan Presiden Prabowo seperti nasionalisasi lahan sawit serta pemberantasan mafia tambang dan beras dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan korporasi global dan konglomerasi lokal.

“Kerusuhan diarahkan ke anarki. Tadinya *people power* yang damai, tapi kemudian dibelokkan agar menjadi huru-hara,” jelasnya.

### **Kelompok “KKO” Sang Operator Lapangan**

Hendrajit juga menyoroti adanya kelompok lapangan yang terorganisir rapi, lengkap dengan logistik hingga bom molotov. Namun, itu bukan representasi aksi damai melainkan skenario *chaos*.

“Itu aktor lapangan yang menjabarkan skema dari sutradara bayangan. Bayangannya ini nyata



ada, tapi tidak kasat mata,” tegas Hendrajit.

Lalu siapa para operator lapangan sebagai tuas para konglomerasi Barat dan lokal? Hendrajit menduga mereka bukan kelompok kanan atau kiri.

“Mereka ini kita sebut sebagai kelompok KKO. Alias kelompok kanan kiri ok,” pungkasnya.

Sedangkan kelompok ketiga, terdapat kelompok elite politik tertentu yang merasa terancam karena kehilangan posisi dan akses kekuasaan pasca konfigurasi politik terbaru. Para elite ini, terutama dari pihak oposisi atau faksi yang tersisih, diduga memiliki kepentingan menciptakan instabilitas sebagai alat tawar-menawar politik.

Mereka melihat kerusuhan sebagai momentum untuk melemahkan lawan dan memperoleh konsesi. “Elite politik oposisi sering disebut-sebut sebagai pihak yang memiliki kepentingan besar mendorong terjadinya kerusuhan,” ungkap Rokhmat Widodo.

Kebijakan Prabowo yang disampaikan dalam pidato kenegaraan, akan melawan mafia-mafia sawit, tambang dan pangan menjadi alarm bagi para mafia yang selama ini menikmati kekayaan alam Indonesia.

Bahkan Prabowo *me-warning* para jenderal dari TNI dan polisi agar tidak menjadi beking berbagai pertambangan ilegal yang mengeruk kekayaan alam. Hal ini disampaikan

Prabowo dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR pada 16 Agustus 2025.

Pasca kerusuhan Agustus 2025, Prabowo dan publik semakin sadar bahwa perlawanan para mafia dan oligarky itu nyata adanya. Bahkan mungkin kini Prabowo sedang dikepung oleh kelompok ini dan menekan Presiden agar tidak melanjutkan kebijakannya. Prabowo sendiri menyebutnya ada upaya mengarah ke makar dan tindakan terorisme.

Namun di sisi lain, kemarahan rakyat atas kondisi ekonomi adalah kenyataan yang harus diakui. PHK massal dan pengangguran, harga-harga yang mahal, dan ketidakpastian hidup harus segera diselesaikan Prabowo. Karena itulah akar masalahnya saat ini. Api dalam sekam masih menyala.

“Lebih baik Pak Prabowo mengakui kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Lalu lakukan langkah nyata memberikan pekerjaan dan kepastian hidup bagi kelas menengah dan bawah yang saat ini sedang terhimpit,” kata ekonom Yanuar Rizky.

Jika Prabowo fokus menyelesaikan persoalan ekonomi berarti ia memadamkan api dalam sekam. Berpihak kepada rakyat. Kepungan mafia yang memanfaatkan rumput kering pun akan menemui jalan buntu.

Rizal Malik, Elroby Jawi Fahmi



Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foto/pri.

## Reformasi yang Tertunda dan Persaingan Elit, Mempercepat Delegitimasi Polri

**K**EKERASAN aparat dalam demonstrasi akhir Agustus 2025 menjadi momentum yang menyoroti krisis legitimasi Polri. Bukan hanya karena jatuhnya korban jiwa seperti Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, namun juga karena terkuaknya persoalan struktural, seperti lemahnya akuntabilitas, kendali yang terpusat tanpa pengawasan efektif, dan moral institusional yang terkikis.

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan, bahwa Polri saat ini memiliki kewenangan sangat

luas dan menjadikan Polri sebagai superbody yang rawan penyalahgunaan kekuasaan. Ditambah anggaran sebesar Rp100 triliun, lembaga ini dinilai semakin brutal, bukan akuntabel.

“Dalam Tuntutan Rakyat 17+8, Polri menjadi institusi yang paling mendesak untuk dibenahi. Dengan anggaran lebih dari Rp 100 triliun, Polri justru semakin brutal dan sewenang-wenang, bukan semakin akuntabel,” beber peneliti ICJR, Iftitah Sari, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/9/2025).

Tragedi Affan menjadi simbol paling menyayat. Aliansi Dosen menuntut penyelidikan serius, yaitu agar Polri melakukan pengusutan terhadap tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan di tengah aksi, serta penegakan hukum terhadap pelaku.

“Polri dan lembaga penegak hukum lainnya dapat memberikan sanksi dan tindakan yang tegas,” kata anggota aliansi, Mohammad Novrizal.

Polri mencoba merespons. Divisi Propam menggelar sidang etik terhadap tujuh anggota Brimob, termasuk pemecatan Kopol Kosmas, namun hal itu tidak mengurangi kritik publik yang melihat kejadian ini sebagai masalah sistemik.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan mundur jika diperlukan. “Terkait dengan isu yang menyangkut (pencopotan) Kapolri, itu merupakan hak prerogatif presiden. Kita prajurit, kapan saja siap.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa posisi Kapolri kian rapuh, bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto di tengah derasnya tekanan publik.

Di balik krisis ini, mencuat pula dinamika suksesi di tubuh Polri. Kerusuhan akhir Agustus membuat isu pencopotan Kapolri menjadi bahan

spekulasi publik, tetapi sesungguhnya “isu suksesi” sudah terasa sejak jauh hari.

Pada Januari 2025, Kapolri melakukan langkah mengejutkan dengan mengganti Komjen Martinus Hukom dari jabatan Kepala BNN. Seperti diketahui eks Kepala Datasemen Khusus 88/Antiteror ini adalah teman satu angkatan Listo Sigit Prabowo.

Pergantian ini dipandang banyak kalangan sebagai bagian dari rekayasa rotasi di tingkat strategis, yang bukan sekadar teknis, melainkan juga memetakan arah suksesi di internal Polri.

Keputusan tersebut memperlihatkan bagaimana jabatan di luar struktur utama Polri, seperti BNN, tetap digunakan sebagai arena konsolidasi dan

pengaturan jalur karier jenderal bintang tiga.

Situasi kian memanas pada awal Agustus 2025 ketika terjadi mutasi besar-besaran perwira tinggi Polri. Puluhan jenderal berpindah posisi, sebagian menduduki jabatan strategis yang erat kaitannya dengan fungsi operasional keamanan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan proses

**“Dalam Tuntutan Rakyat 17+8, Polri menjadi institusi yang paling mendesak untuk dibenahi. Dengan anggaran lebih dari Rp 100 triliun, Polri justru semakin brutal dan sewenang-wenang, bukan semakin akuntabel,”**



alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi.

Namun, di balik penjelasan formal itu, adanya upaya konsolidasi untuk menata jalur suksesi. Dari 61 perwira yang dimutasi, sejumlah nama menonjol: Komjen Dedi Prasetyo ditetapkan sebagai Wakapolri, Komjen Syahardiantono mengisi kursi Kabareskrim, Komjen Akhmad Wiyagus ke Kabaintelkam, dan Irjen Karyoto ke Baharkam.

Penempatan terakhir inilah yang memunculkan isu ketidakpuasan. Karyoto bahkan harus memberikan klarifikasi, “Tidak ada sama sekali, hubungan saya sama Pak Kapolri itu sangat bagus. Beliau sangat sayang ke saya, dan saya sangat hormat ke beliau,” kata Karyoto.

Ia menegaskan bahwa kabar dirinya menolak jabatan Baharkam adalah hoaks. “Sangat hoax dan tidak benar isi ceritanya. Itu akun disebar untuk membuat seolah mempertentangkan saya dengan Pak Kapolri,” Karyoto menegaskan kembali.

Isu Karyoto

menunjukkan bahwa dinamika suksesi Polri tidak steril dari intrik politik internal. Jabatan Baharkam dianggap ‘parkir’ bagi perwira senior yang gagal menembus jalur menuju kursi Kapolri.

Maka, ketika kerusuhan Agustus memunculkan desakan agar Kapolri dicopot, spekulasi mengenai siapa calon penggantinya semakin mengemuka. Nama-nama yang sudah ditempatkan di posisi strategis pasca-mutasi otomatis masuk dalam perhitungan.

Suksesi Polri, dengan demikian, tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berjalan beriringan dengan krisis legitimasi akibat brutalitas aparat.

### Polisi Hanya Jadi Alat Kekuasaan Bukan Pelindung

Dampak sosial dari krisis ini sangat nyata. Kepercayaan publik terhadap Polri merosot tajam. Bagi masyarakat sipil, kasus Affan memperkuat persepsi bahwa polisi lebih sering menjadi alat represi ketimbang pelindung.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan bahwa tindakan brutalitas Polri telah melanggar Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, implementasi prinsip dan standar HAM Perkap No. 8 Tahun 2009.



foto: aktual.com



Dalam kerangka negara hukum, pelanggaran ini tidak bisa dianggap enteng. Ia menandai mundurnya komitmen demokrasi yang seharusnya dijaga pascareformasi 1998.

Di lapangan sosial, kekerasan aparat menimbulkan trauma kolektif. Warga semakin enggan turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat karena khawatir berhadapan dengan aparat yang represif.

Rasa takut itu bisa menggerus salah satu fondasi utama demokrasi, yaitu kebebasan berkumpul dan berekspresi. Lebih jauh, setiap kali kekerasan aparat disiarkan dan viral di media sosial, jarak antara masyarakat dan polisi semakin melebar. Yang muncul bukan citra Polri Presisi sebagaimana jargon resmi, melainkan gambaran

polisi yang berhadapan frontal dengan rakyatnya sendiri.

Kombinasi antara dinamika suksesi internal yang sarat intrik dan dampak sosial yang semakin buruk menempatkan Polri di persimpangan sejarah. Dari luar, tuntutan reformasi struktural menguat.

Dari dalam, perebutan jalur karier dan spekulasi suksesi semakin mempertebal ketidakpastian. Tanpa langkah reformasi serius, krisis kepercayaan ini tidak akan mereda, melainkan berpotensi memicu gelombang delegitimasi yang lebih luas.

“Polri menjadi institusi yang paling mendesak untuk dibenahi,” kata Iftitah.

*Rizal Malik, Elroby Jawi Fahmi*

# Polri Superbody Tanpa Pengawasan, ICJR Desak Reformasi Mendesak



foto: aktual.com

**I**nstitute For Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa reformasi kepolisian merupakan agenda yang paling mendesak saat ini. Peneliti ICJR, Iftitah Sari, menekankan bahwa meski Polri memperoleh anggaran lebih dari Rp100 triliun, institusi ini justru semakin kerap menunjukkan sikap brutal dan sewenang-wenang, bukan semakin akuntabel.

“Dalam Tuntutan Rakyat 17+8,

Polri menjadi institusi yang paling mendesak untuk dibenahi. Dengan anggaran lebih dari Rp100 triliun, Polri justru semakin brutal dan sewenang-wenang, bukan semakin akuntabel,” kata Iftitah, Selasa (4/9).

## Polri Sebagai “Superbody” yang Sulit Diawasi

Polri saat ini memiliki kewenangan sangat luas, mulai dari menjaga ketertiban, melayani masyarakat,





foto: Tino Oktaviano/aktual.com

hingga menegakkan hukum pidana. Konsentrasi kewenangan tersebut menjadikan Polri sebagai superbody yang rawan penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, secara filosofis, tugas utama kepolisian seharusnya berfokus pada pencegahan demi menjaga keamanan masyarakat sehari-hari.

Namun dalam praktiknya, fungsi Polri bercampur antara sipil dan militeristik serta kerap terhubung dengan kepentingan politik. Kondisi ini bukan hanya memicu tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, melainkan juga membuka ruang penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, hingga lemahnya akuntabilitas. Ifitah menekankan, kedudukan Polri di bawah Presiden

semakin memperkuat risiko menjadikan kepolisian sebagai alat kekuasaan politik.

“Polri menjadi superbody tanpa pengawasan: memegang fungsi pelayanan, penegakan hukum, hingga pengendalian massa,” jelasnya.

### **Lemahnya Mekanisme Pengawasan**

Persoalan serius lain adalah rapuhnya sistem pengawasan. Dalam teori, kewenangan besar Polri seharusnya diimbangi dengan pengawasan internal, eksternal, serta partisipasi publik. Namun, pengawasan internal lewat Propam sering kali lumpuh akibat relasi kepangkatan, bahkan dalam kasus Brigadir Yosua, pucuk pengawas internal justru ikut terlibat dalam kejahatan.

Sementara itu, pengawasan eksternal melalui Kompolnas hanya bersifat formalitas tanpa daya paksa. Akibatnya, muncul lingkaran impunitas yang membuat pelanggaran terus berulang tanpa konsekuensi tegas.

“Pengawasan lemah: Propam lumpuh karena relasi hierarkis dan kepangkatan, sementara Kompolnas hanya bersifat formalitas tanpa daya paksa,” ucap Ifitah.

Ia menilai, perlu dibentuk tim independen yang benar-benar otonom dari Polri maupun pemerintah, dengan kewenangan investigasi, akses penuh

terhadap data, dan hak memberikan sanksi yang mengikat.

### Bahaya Politisasi Polri

Selain itu, ICJR menekankan pentingnya depolitisasi Polri. Iftitah mencontohkan pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang mengaku dapat memerintahkan polisi menangkap demonstran, bahkan anak di bawah umur. Hal tersebut memperlihatkan betapa rawannya Polri terhadap intervensi politik.

Politisasi juga tercermin dalam pengangkatan pejabat kepolisian di daerah yang kerap sarat intervensi partai politik, serta kasus kriminalisasi aktivis HAM seperti Fatiya Maulidiyanti dan Haris Azhar.

“Politisasi: Polri rentan dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam kritik,” tegas Iftitah.

### Anggaran Raksasa yang Tidak Transparan

Polri mengantongi anggaran lebih dari Rp100 triliun pada APBN 2025. Namun, menurut laporan ICW, sebagian dana besar ini justru digunakan untuk pengadaan senjata, kendaraan taktis, dan gas air mata senilai Rp188 miliar, alih-alih peningkatan pelayanan publik dan profesionalisme aparat.

“Anggaran raksasa: triliunan rupiah terserap untuk senjata, gas air mata, dan proyek surveillance, bukan untuk pelayanan publik,” lanjutnya.

*Rizky Zulkarnain*

## Usulan Reformasi ICJR:

ICJR kemudian menyodorkan sejumlah langkah reformasi, antara lain:

- Memisahkan fungsi Polri: penegakan hukum, pelayanan publik, dan pengendalian massa agar tidak terpusat pada satu lembaga.
- Membentuk pengawasan independen dengan kewenangan penuh

investigasi, akses data, dan hak memberi sanksi.

- Mendorong depolitisasi Polri agar netral sesuai konstitusi.
- Melakukan audit anggaran untuk memastikan dana rakyat dipakai bagi peningkatan profesionalisme, perlindungan HAM, serta pelayanan masyarakat.



foto: aktual.com

foto: aktual.com

# Mutasi, Sinyal Suksesi di Tubuh Polri?

**R**otasi besar-besaran di tubuh Polri pada 5 Agustus 2025 memberi sinyal kuat bahwa suksesi kepemimpinan di institusi Bhayangkara telah memasuki babak baru. Dalam satu Surat Telegram Rahasia, belasan posisi strategis diganti.

Komjen Dedi Prasetyo naik menggantikan Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri. Komjen Wahyu Widada berpindah dari Kabareskrim ke Irwasum, sementara Komjen Syahardiantono mengisi kursi Kabareskrim yang ditinggalkannya.

Komjen Akhmad Wiyagus

menempati jabatan Kabaintelkam dan Komjen Fadil Imran digeser menjadi Asisten Operasi Kapolri. Tidak berhenti di sana, tak kurang dari sebelas Kapolda pun berganti, mulai dari Polda Metro Jaya, Aceh, Banten, Maluku, hingga Sulawesi Barat. Publik yang mengikuti dinamika ini tentu segera menghubungkan mutasi besar tersebut dengan bursa calon Kapolri berikutnya.

Swwecara formal, rotasi ini disebut sebagai mutasi rutin. Namun pola pengisian kursi kunci justru memperlihatkan arah yang lebih dalam. Selama ini jabatan Wakapolri, Kabareskrim, Irwasum, dan Kapolda besar seperti Metro Jaya dikenal sebagai jalur cepat menuju posisi orang nomor satu di Polri.

Maka wajar bila publik membacanya sebagai etalase kandidat, siapa yang sedang dipoles, siapa yang sedang diuji, dan siapa yang perlahan tersisih.



Konteks politik nasional semakin mempertebal tafsir itu. Penunjukan Kapolri dalam sejarahnya selalu melibatkan restu politik, meski secara prosedur dibungkus mekanisme administratif melalui fit and proper test DPR.

Tidak berlebihan jika mutasi ini disebut sebagai bagian dari manuver elite, sebuah rekayasa halus untuk mengamankan kepentingan politik pada fase krusial pasca-pemilu.

Di tengah konfigurasi baru itu, dua nama mulai ramai diperbincangkan. Adalah Irjen Rudi Darmoko dan Komjen Rudy Heriyanto. Keduanya sama-sama Rudi, tetapi dengan jalur dan modal berbeda.

Rudi Darmoko, peraih Adhi Makayasa Akpol 1993, baru saja ditugaskan sebagai Kapolda NTT setelah sebelumnya menjabat Kasespim Lemdiklat Polri. Sebagai lulusan terbaik angkatan, ia memiliki legitimasi prestasi akademis sekaligus pengalaman membina calon-calon pemimpin Polri.

Usianya yang lahir pada 1971 masih relatif muda, memberi ruang masa bakti yang panjang. Namun, ia masih berpangkat Irjen, satu tingkat di bawah Komjen, sementara kursi Kapolri secara preseden hampir selalu diisi perwira bintang tiga yang sebelumnya menempati jabatan inti seperti Wakapolri, Kabareskrim, atau Kapolda Metro.

Dengan demikian, jalan Darmoko lebih mirip investasi jangka menengah.

foto: polri.go.id



Artinya potensi besar tetapi ia masih memerlukan satu loncatan strategis ke pangkat Komjen agar benar-benar masuk bursa.

Berbeda dengan Darmoko, Rudy Heriyanto sudah mencapai pangkat Komjen. Kariernya lintas bidang. Heriyanto pernah menjadi Dirlitipideksus Bareskrim, Kadivkum, dan Kapolda Banten. Pada Desember 2023, ia ditarik ke birokrasi sipil sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Presiden.

Portofolionya terbilang lengkap, mulai dari reserse, hukum, hingga pengalaman manajerial di kementerian. Heriyanto bukan lulusan Akpol melainkan Sepa Polri 1993, fakta yang tidak menjadi halangan hukum, tetapi dalam tradisi internal cukup jarang menghasilkan Kapolri.

Lebih dari itu, saat ini ia berada di luar garis komando operasional Polri, sehingga kansnya akan sangat bergantung pada apakah ia bisa kembali ke pos strategis di Mabes atau tidak. Jika re-entry itu terjadi, ia bisa menjadi kuda hitam yang serius.



Rotasi Agustus lalu memperlihatkan bahwa pucuk kursi strategis kini dikuasai oleh Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri, Syahardianto sebagai Kabareskrim, dan Wahyu Widada sebagai Irwasum.

Pola historis menunjukkan bahwa salah satu dari posisi ini biasanya melangkah ke kursi Kapolri. Namun politik tidak selalu linear. Presiden, sebagai pemegang hak prerogatif, bisa saja memilih jalur berbeda.

Nama Rudy Heriyanto dengan pangkat Komjen dan rekam jejak hukum yang kuat bisa menjadi alternatif jika kepentingan politik menuntut figur yang mampu menjembatani Polri dengan birokrasi sipil.

Sementara itu, nama Rudi Darmoko mungkin lebih dilihat sebagai generasi pelapis yang disiapkan untuk periode selanjutnya, terutama jika ia dalam satu atau dua tahun mendatang melompat ke pangkat Komjen.

Persoalan utama dalam dinamika ini bukan hanya siapa yang akan naik, tetapi bagaimana publik membaca pola relasi Polri dengan kekuasaan. Surat Telegram Rahasia yang menjadi instrumen mutasi jarang sekali

menyebutkan alasan perpindahan. Ruang kosong ini memunculkan spekulasi apakah promosi didasari prestasi, loyalitas, atau tekanan politik.

Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, kedekatan Polri dengan kekuasaan selalu menjadi pola yang berulang. Meskipun reformasi memisahkan Polri dari ABRI pada tahun 2000 dengan semangat membangun polisi sipil yang demokratis, praktik di lapangan kerap masih sarat nuansa otoriter dan transaksional. Demokrasi sering kali hanya menjadi bungkus, sementara di dalamnya terjadi kompromi politik.

Jabatan Kapolri dengan demikian tidak sekadar posisi profesional, melainkan simbol politik yang mempertemukan kepentingan hukum dan elite. Mutasi besar seperti yang terjadi Agustus lalu akan terus dibaca dalam kerangka itu.

Publik akan menilai bukan hanya siapa yang dipromosikan, tetapi juga siapa yang mendapat dukungan politik. Demokrasi sejati hanya bisa diwujudkan bila Polri berdiri sebagai penjaga hukum, bukan pemain dalam gelanggang kekuasaan.

Mutasi kali ini pada akhirnya akan dinilai bukan dari daftar nama yang bergeser, melainkan dari arah yang dituju, apakah Polri melanjutkan reformasi menuju polisi modern dan profesional, atau justru kembali ke pola lama yang sekadar dibungkus jargon demokrasi.

*Andry Haryanto*



# Kerusuhan Agustus 2025: Penunggang Gelap Demontrasi Menyelinap Lewat Media Sosial

Oleh : Rizal Maulana Malik  
Pemimpin Redaksi Aktual.com

Demonstrasi sejumlah elemen mahasiswa dan buruh yang dimulai pada 25 Agustus 2025 berubah secara eskalatif, dan cepat. Demonstrasi menjadi anarki dan berujung kerusuhan di Jakarta dan daerah.

Kerusuhan pada 28 hingga 30

Agustus 2025, terjadi lantaran para penunggang gelap berhasil “membajak” agenda demonstrasi damai mahasiswa dan buruh menjadi gerakan emosi massa yang destruktif.

Agenda para mahasiswa dan buruh menuntut penghapusan tunjangan dan





foto: aktual.com

fasilitas DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, kenaikan pajak bumi dan bangunan, dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Namun agenda itu hilang seketika, karena demo berubah menjadi anarki. Isu yang muncul adalah pembakaran.

Pemicu lain demonstrasi menjadi kemarahan publik adalah meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan rantis Brimob. Markas Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat langsung menjadi sasaran amuk massa.

Ribuan orang termasuk

driver ojol yang “dikomando” melalui media sosial berdatangan dan meminta keadilan atas tewasnya Affan.

Kerusuhan semakin meluas. Sejumlah kendaraan polisi dibakar, gedung perkantoran di sekitarnya juga dijarah massa. Kantor Polres Jakarta Timur dan hampir seluruh kantor Polsek Jakarta Timur dibakar. Kantor Polres Jakarta Utara, dan bekas kantor Polres Jakarta Pusat juga jadi sasaran amuk massa.

Kerusuhan dengan cepat merembet ke Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Hampir seluruh gedung DPRD di kota tersebut dibakar massa.



foto: Tino Oktaviano/aktual.com



foto: Tino Oktaviano/aktual.com

Aksi anarki pun mengarah ke rumah pejabat negara. Rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach dirusak dan dijarah massa. Dan terakhir, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tangerang juga tak luput dari aksi penjarahan.

Berbeda dengan kerusuhan pada 1998 yang berbau etnis dengan menjarah toko etnis tertentu dan mall, serta pemerkosaan, kerusuhan Agustus 2025 kali ini lebih mengarah kepada perusakan simbol-simbol kekuasaan di pusat dan daerah.

Kekerasan yang dibuat tidak diarahkan kepada konflik horisontal. Gerakan ini berjalan secara proradis dan menyasar properti pejabat politik yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

## Paradoks Media Sosial dan Emosi yang Mewabah

Manipulasi para penunggang gelap ini berhasil dilakukan melalui ruang demokrasi baru di era digital. Peran media sosial menjadi katalisator paling efektif membuat gerakan protes keras meluas secara cepat.

Tayangan live maupun postingan di media sosial menjadi tontonan publik dan berhasil memprovokasi kelompok yang paling rentan. Para pelajar, pekerja paling bawah, pengangguran dan lainnya menjadi kelompok paling banyak terprovokasi.

Mereka datang tanpa agenda tuntutan yang jelas. Akhirnya menjarah, melempar batu ke aparat atau membakar gedung.

Mobilisasi massa tidak lagi dilakukan secara konvensional seperti pada 1998, tetapi cukup dengan membuat hastag tertentu di media sosial. Tanpa harus ada struktur organisasi aksi yang hirarkis.

Ruang digital seperti media sosial

sebagai sebuah teknologi berbasis algoritma ini menunjukkan dua sisi yang paradoks. Satu sisi bisa menjadi kanal untuk mengkritik pemerintah dan memperkuat *check and balances*.

Banyak kasus kebijakan pemerintah berubah dan dianulir, setelah kebijakan itu mendapat kritik keras dan luas di media sosial. No viral, no justice.

Namun di sisi lain, media sosial juga bisa dengan mudah digunakan para penunggang gelap demonstrasi, menjadi alat provokasi, penyebaran hoaks, dan membelokkan narasi tuntutan substantif mahasiswa dan buruh ke narasi lain.

Mengutip Jonah Berger dalam buku *Contagious* menyebutkan, bahwa sebuah informasi atau isu akan menjadi wabah atau viral dengan cepat, salah satunya karena isu itu memantik emosi publik.

Menurutnya, emosi yang dimiliki manusia itu dibagi dalam dua kategori. Pertama, emosi yang membuat seseorang menjadi pasif. Tidak bergerak. Emosi itu adalah kesedihan dan keharuan.

Kedua, adalah emosi yang membuat seseorang menjadi siaga atau bertindak. Emosi itu adalah kegembiraan dan kemarahan. Dua emosi inilah yang membuat siapapun akan membuat fisiknya bergerak. Melakukan sesuatu. Emosi inilah yang memicu kerusuhan saat ini.

Penyebab lain kerusuhan Agustus 2025 adalah akumulasi kekecewaan

publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan elit DPR yang tidak berpihak kepada rakyat. Tekanan ekonomi dan beban hidup adalah akar dari persoalan.

Namun kegelisahan dan beban itu tampaknya tidak tersalurkan dengan baik melalui DPR. Seluruh kekuatan partai politik diakomodir oleh pemerintah. Partai yang kalah saat Pilpres 2024 pun masuk dalam kabinet.

Padaahal seharusnya ada partai yang menjadi oposisi formal atau penyeimbang. PDIP yang tidak masuk pemerintah pun masih bersikap abu-abu dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kontak politik inilah yang membuat saluran aspirasi menjadi tersumbat.

Pilihan terakhir guna mengontrol dan menyuarakan aspirasi itu hanya ada di media sosial dan jalanan. Dua pilar inilah tampaknya saat ini yang bisa menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan yang lebih baik.

Namun dua pilar ini yang terus menerus menjadi penyeimbang pemerintah, dampaknya akan lebih besar terhadap stabilitas dan ekonomi. Jika tiap hari ribuan elemen berdemonstrasi dan berisik di media sosial, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga investasi.

Oposisi atau penyeimbang kekuasaan lewat partai tetaplah dibutuhkan, agar aspirasi rakyat bisa disalurkan dengan baik. Karena itulah esensi sebuah demokrasi.



# Raya Tidak Mati karena Cacing, Tapi karena Politik

**R**aya, balita dari Sukabumi, meninggal dunia bukan semata karena cacingan, melainkan karena negara gagal melindungi hak paling dasar warganya. Tubuh mungilnya dipenuhi cacing gelang. Lebih dari satu kilogram cacing hidup berhasil dikeluarkan sebelum ia mengembuskan napas terakhir.

Hampir seabad setelah republik ini berdiri, seorang anak masih bisa mati karena penyakit yang mestinya mudah dicegah. Apa bedanya kita dengan bangsa yang gagal?

Raya lahir dari keluarga miskin. Ayahnya bekerja serabutan, tanpa kepastian upah. Ibunya diduga mengalami gangguan mental, sehingga tidak sepenuhnya mampu merawat anaknya dengan baik.

Rumah mereka panggung kayu dengan lantai tanah, tanpa akses air bersih dan sanitasi. Dalam kondisi itu, cacing bukan sekadar ancaman, tetapi bagian dari realitas hidup sehari-hari. Raya tumbuh dalam lingkaran rapuh kemiskinan, kesehatan yang buruk, dan keluarga yang rentan.

Padaahal, konstitusi kita tegas. UUD

1945 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

Kata dipelihara tidak bisa ditafsirkan lain kecuali sebagai kewajiban negara untuk hadir secara konkret.

Fakir miskin dan anak-anak yang lahir dari keluarga seperti Raya seharusnya mendapat perhatian penuh gizi yang cukup, lingkungan sehat, serta pendampingan sosial bagi orangtua yang rentan.

Namun pasal itu hanya menjadi hiasan di teks Undang-Undang Dasar. Dalam kenyataannya, program pemerintah sekadar rutinitas administratif. Raya memang mendapat obat cacing dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari posyandu.

Tetapi makanan itu habis dalam dua hari, sementara berat badannya tetap gizi buruk. Negara hadir sebentar, mencatat, lalu pergi. Raya tetap hidup dengan perut penuh cacing, hingga akhirnya mati dalam kesepian pelayanan publik.



foto: aktual.com



Kontras sekali dengan para legislator yang justru sibuk mengklarifikasi soal gaji dan tunjangan. Mereka berkata gaji tidak naik, hanya tunjangan yang bertambah. Pernyataan itu terdengar seperti satire di tengah kabar kematian anak miskin.

Bagaimana tidak, tunjangan perumahan mereka bisa Rp50 juta per bulan, ditambah transportasi, komunikasi, hingga asisten pribadi. Total penghasilan bisa menembus Rp100 juta lebih per bulan. Bandingkan dengan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat yang hanya Rp2,1 juta. Ketimpangan ini bukan sekadar angka, melainkan jurang sosial yang nyata.

Dan jangan lupa, semua uang itu bersumber dari rakyat. Dari pajak yang dipungut tanpa henti. PPN di belanja harian, PPH di slip gaji, PBB di tanah warisan, hingga pungutan plastik di minimarket.

Pajak yang mestinya menjamin hak-hak dasar justru mengalir deras ke fasilitas mewah para pejabat. Subsidi kendaraan listrik bisa melonjak

menjadi Rp7 triliun, tapi anggaran untuk memperbaiki sanitasi dasar dan layanan kesehatan masyarakat miskin tetap seret.

Jika pejabat bisa tinggal di rumah sewaan Rp50 juta per bulan, mengapa seorang anak harus mati di rumah tanah dengan ibu yang sakit dan ayah yang tak berdaya?

Raya tidak mati karena cacing. Ia mati karena politik anggaran yang salah prioritas. Ia mati karena pelayanan publik yang buruk, yang lebih fasih menyusun laporan ketimbang menyelamatkan nyawa. Ia mati karena konstitusi yang menjanjikan perlindungan bagi fakir miskin dan anak terlantar hanya berhenti sebagai retorika.

Kematian Raya adalah cermin. Ia memperlihatkan bahwa republik ini masih rela membiarkan anak miskin dikorbankan demi kenyamanan elit. Bahwa pajak rakyat lebih cepat cair untuk tunjangan pejabat daripada untuk perbaikan gizi. Bahwa pelayanan publik lebih sibuk menjaga citra ketimbang melindungi yang paling rentan.

Setiap kali pejabat menepuk dada soal pembangunan, cacing di perut Raya menertawakan kebohongan itu. Dan setiap kali negara memungut pajak dengan dalih demi kesejahteraan rakyat, wajah ibu Raya yang sakit dan ayahnya yang lelah seharusnya menghantui nurani bangsa, bahwa janji konstitusi telah gagal ditepati.

Tabik!

*Andry Haryanto*



foto: Aktual/HO

## Prof Saparudin–Dessy Ayutrisna Menang Telak Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 3, Prof Saparudin dan Dessy Ayutrisna, sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang 2025.

Keputusan ini diumumkan usai rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kota yang digelar KPU di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Selasa (2/9/2025). Dalam pleno tersebut, pasangan yang akrab disapa Prof Udin–Cece Dessy berhasil meraih 39.546 suara sah, unggul jauh dari tiga

pasangan calon lainnya.

Kemenangan ini tergolong mutlak. Prof Udin–Cece Dessy mendominasi perolehan suara di seluruh kecamatan, dengan angka tertinggi di Kecamatan Gerunggang mencapai 7.903 suara. Dukungan merata di semua wilayah menegaskan kuatnya kepercayaan masyarakat Pangkalpinang terhadap pasangan ini.

Dengan hasil resmi dari KPU, Prof Udin–Cece Dessy kini tinggal menunggu jadwal pelantikan untuk memimpin Kota Pangkalpinang periode 2025–2030.

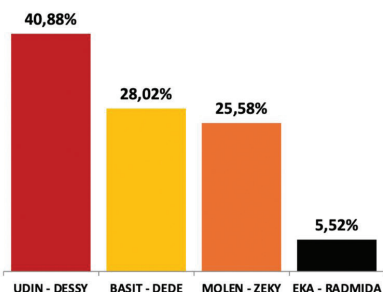


## PERBANDINGAN HASIL PSU PILKADA KOTA PANGKALPINANG 2025 QUICK COUNT & REAL COUNT

RATA-RATA SELISIH  
**0.47%**



QUICK COUNT SCL TAKTIKA  
RABU, 27 AGUSTUS 2025



REAL COUNT KPUD PANGKALPINANG  
SELASA, 2 SEPTEMBER 2025

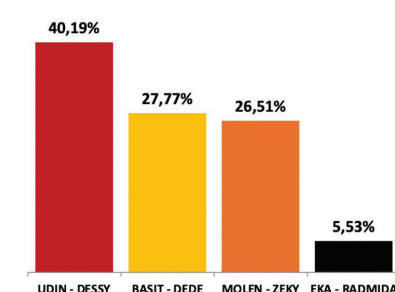


foto: SCL Taktika

### Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025:

- Paslon 1, Eka Mulyia Putra–Radmida Dawam: 5.439 suara.
- Paslon 2, Maulan Akil–Zeki Yamani: 26.085 suara.
- Paslon 3, Prof. Saparudin–Dessy Ayutrisna: 39.546 suara.
- Paslon 4, Basit Cinda Sucipto–Dede Purnama Alzulami: 27.325 suara.

Adapun jumlah seluruh suara sah tercatat 98.395, suara tidak sah 5.461, sehingga total suara masuk sebanyak 103.856.

### Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada 2024

Pada November 2024, sejarah kecil tapi menggema tercipta di Kota Pangkalpinang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik lokal, kotak

kosong mengalahkan pasangan calon tunggal dalam pemilihan wali kota.

Hasil rekapitulasi menunjukkan kotak kosong meraih 48.528 suara atau 57,89 persen, meninggalkan pasangan petahana Molen–Hakim dengan hanya 35.177 suara atau 42,02 persen. Kekalahan itu bukan sekadar angka, tapi tanda frustrasi kolektif warga atas terbatasnya pilihan.

Menanggapi fenomena tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang menetapkan digelarnya Pilkada Ulang pada 27 Agustus 2025.

Tidak lagi tunggal, kini warga disuguhi empat pasangan calon dengan karakter, kekuatan, dan pendekatan politik yang berbeda-beda. Persaingan menjadi terbuka, dan kali ini tak ada yang boleh menganggap enteng suara diam.

Andry Haryanto



foto: Antara Foto

# Sederet Loyalis Jokowi Tersandung Hukum, Bersih-bersih Era Prabowo?

**G**elombang kasus hukum yang menjerat loyalis Presiden Joko Widodo memperlihatkan arah baru penegakan hukum di era Prabowo Subianto. Dari Budi Arie Setiadi, Yaqut Cholil Qoumas, Immanuel Ebenezer, Nadiem Makarim, hingga Silfester Matutina, publik melihat pola aparat kini berani menindak tanpa pandang bulu.

Kasus pertama yang mencuat adalah dugaan judi online yang menyeret nama Budi Arie. Dakwaan di pengadilan menyebut adanya penerimaan dana oleh eks Menkominfo itu.

“Budi Arie Setiadi menerima jatah sebesar 50 persen dari keseluruhan website yang dijaga,” tegas jaksa penuntut umum dalam persidangan di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kendati muncul dalam uraian dakwaan, penyidik belum kunjung memanggil Budi Arie yang kini duduk di kursi Menteri Koperasi dan UMKM.

Selanjutnya, KPK menyoroti dugaan korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Skema pembagian kuota tambahan yang janggal langsung dipertanyakan.

“Lalu kenapa bisa 50 persen:50 persen?” ujar Plt Deputy Penindakan KPK Asep Guntur.

Usai diperiksa, Yaqut menanggapi dengan hati-hati, “Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal.”

Gelombang penindakan berlanjut ketika KPK menangkap Wamenaker



foto: aktual.com

Immanuel Ebenezer. Dalam operasi tangkap tangan, penyidik KPK menemukan barang bukti mencolok. Noel, sapaan Immanuel Ebenezer, adalah bekas pentolan Jokowi Mania.

“Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Ia menambahkan, “IEG meminta uang Rp3 miliar untuk renovasi rumah hingga satu unit motor Ducati.”

Puncaknya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka korupsi pengadaan Chromebook.

“Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.

Kendati demikian, Nadiem membantah keras tuduhan itu. “Saya tidak melakukan apapun. Allah akan mengetahui kebenaran,” kata Nadiem.

Tak ketinggalan, Silfester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, juga jadi sorotan. Ia berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik Jusuf Kalla dengan vonis inkrah 1,5 tahun penjara, namun hingga kini belum dieksekusi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pihaknya ‘sedang mencari’ Silfester untuk menjalani hukuman.

Fenomena ini memicu tafsir politik. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai keberadaan loyalis Jokowi di lingkaran pemerintahan berpotensi melahirkan ‘dua matahari’ yang membingungkan publik.

Ia menyarankan Prabowo bertindak tegas mengevaluasi menteri-menteri tersebut, agar roda pemerintahan satu komando.

Sementara itu, Direktur IPO Dedi Kurnia Syah menilai penindakan ini sebagai ‘peluang Prabowo untuk membersihkan loyalis Jokowi, sekaligus menegaskan pengaruhnya lebih dominan dibanding bayang-bayang Jokowi.

*Rizky Zulkarnain, Erwin C Sihombing*

## Kosmas K. Gae Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat Akibat Tabrak Affan Kurniawan

Kompol Kosmas K. Gae dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan atas keterlibatannya dalam kasus kendaraan taktis (rantis) menabrak seorang sopir ojek online (ojol) pada Kamis (28/8).

“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/9).

Dijelaskan Trunoyudo, Kosmas selaku Danyon A Resimen IV Pasukan Pelopor Korbrimob Polri telah bertindak tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa atas nama Affan Kurniawan.

Sanksi lainnya yang diberikan adalah sanksi etika, yakni perilaku Kosmas dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Selain itu, dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus (patsus) selama enam hari mulai 29 Agustus 2025 sampai dengan 3 September 2025 ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri.

“Sudah dijalani oleh pelanggaran dalam sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuh Trunoyudo.

Dalam insiden ini, total terdapat



Foto: ANTARA/HQ-TV Radio Polri/polri

tujuh personel Brimob yang ditetapkan sebagai terduga pelanggar, yaitu Kompol Kosmas K. Gae, Briпка R, Aipda R, Briptu D, Briрda M, Bharaka J, dan Bharaka Y.

Kompol Kosmas dan Briпка R ditetapkan melakukan pelanggaran kategori berat, sedangkan lima personel lainnya ditetapkan melakukan pelanggaran kategori sedang.

Kosmas merupakan sosok yang duduk di samping pengemudi rantis saat insiden tabrakan berlangsung.

Divisi Propam Polri menyatakan bahwa Kosmas terbukti melanggar kode etik dan melakukan pelanggaran kategori berat.

Sementara itu, Briпка R selaku pengemudi rantis juga ditetapkan melakukan pelanggaran kategori berat.

Adapun Briпка R dijadwalkan menjalani sidang etik pada Kamis (4/9).

Insiden rantis Brimob menabrak pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan terjadi pada Kamis (28/8) malam, setelah berbagai elemen



masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen, Jakarta, dipukul mundur oleh pihak kepolisian.

Akibatnya, kericuhan terjadi hingga ke berbagai wilayah di

sekitaran kompleks parlemen, mulai dari Palmerah, Senayan, hingga Pejompongan. Adapun insiden rantis menabrak pengemudi ojol itu diduga terjadi di wilayah Pejompongan.

*Rizky Zulkarnain*

## Kapuspen TNI Ungkap Massa Anarkis Sudah Terlatih

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengemukakan kelompok massa yang bertindak anarkis saat demonstrasi beberapa hari lalu terlihat cukup terlatih dan terorganisasi.

Hal tersebut dikatakan Freddy untuk merespons pertanyaan soal banyaknya masyarakat yang mendukung aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum dilakukan orang yang sangat profesional karena terkesan rapih.

“Memang kalau kita amati untuk polanya terlihat terorganisasi dan terlatih ya,” kata Freddy saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (5/9).

Walau demikian, Freddy tidak mau menduga siapa pihak-pihak yang melatih aktor perusuh dan pelaku perusakan di tengah aksi demonstrasi beberapa hari lalu.

Kapuspen juga tidak mau berspekulasi siapa pihak yang menggerakkan massa hingga akhirnya tercipta situasi anarkis.

Ia mengatakan bahwa TNI hanya fokus memperbaiki dan memperkuat sistem pengamanan agar peristiwa



foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/bat

pembakaran fasilitas umum saat demonstrasi tidak terjadi lagi.

Dengan perbaikan tersebut, TNI diharapkan semakin siap dalam mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Freddy menambahkan bahwa TNI juga akan terbuka dan menerima kritik masyarakat demi memperbaiki upayanya dalam menjaga stabilitas keamanan saat demonstrasi berlangsung.

“Kita terbuka bagi pengamat-pengamat yang memberikan sebuah masukan bagi kami untuk berbenah mengevaluasi diri juga agar kita lebih cermat, lebihantisipasi kemudian lebih siap dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan,” jelas Freddy.

*Rizky Zulkarnain*



foto: setneg.go.id

# Dua Panggung, Satu Pesan: Indonesia Bergerak ke Timur



**T**ahun 2025 menandai babak baru bagi diplomasi Indonesia. Dua peristiwa besar, yaitu bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di parade militer

China 3 September 2025. Hal ini mencerminkan pergeseran orbit geopolitik yang semakin nyata.

Masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025 merupakan langkah strategis sekaligus berani. Dengan BRICS, Indonesia mendapatkan peluang besar berupa akses ke New Development Bank untuk membiayai proyek infrastruktur dan energi, diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara Selatan Global, hingga peningkatan daya tawar dalam forum internasional.

Namun, keuntungan itu datang bersama risiko. Amerika Serikat menanggapi dengan menaikkan tarif hingga 32% untuk produk Indonesia, bahkan menambahkan 10% tambahan khusus bagi anggota BRICS.

Tekstil, alas kaki, dan elektronik yang menjadi sektor padat karya andalan ekspor, berpotensi tercekik tarif kumulatif hingga 42%. Untuk meredamnya, Prabowo mengutus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekan paket dagang US\$34 miliar di Washington. Langkah ini menunjukkan Jakarta masih berusaha menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan pijakan di pasar Barat.

Sementara itu, kehadiran Prabowo di parade militer China pada 3 September 2025 menambah bobot simbolis pergeseran orbit tersebut. Berbeda dengan 2015, kali ini



Presiden Indonesia berdiri di podium kehormatan bersama Xi Jinping.

China memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, semakin dekat ke orbit Beijing. Bagi Jakarta, kesempatan ini membuka pintu investasi Belt and Road Initiative, goodwill diplomatik, dan penguatan posisi di ASEAN.

Namun di mata Barat, kehadiran Indonesia di barisan bersama Rusia dan negara-negara pro-Moskow menimbulkan kewaspadaan, apakah Jakarta mulai meninggalkan orbit lama (Barat)?

Dua momen itu menegaskan dilema klasik diplomasi bebas-aktif Indonesia, memetik manfaat dari

BRICS dan kedekatan dengan China, tanpa mengorbankan hubungan dengan Barat. Namun keseimbangan ini semakin rapuh ketika tekanan ekonomi AS makin keras dan stigma geopolitik kian menempel.

Indonesia kini berada di persimpangan strategis. Jika terlalu condong ke BRICS, risiko tekanan Barat makin besar. Jika terlalu berhati-hati dengan Barat, peluang yang ditawarkan Global South bisa terlewat.

Tantangannya adalah memastikan pergeseran orbit ini tidak berubah menjadi ketergantungan baru, melainkan memperkuat posisi Indonesia sebagai penyeimbang di dunia multipolar.

*Andry Haryanto*





foto: presidenrigo.id

## Islam Sebagai Basis Sosial dan Moral: Ketika Negara Kehilangan Suara

Pemanggilan 16 organisasi Islam ke Hambalang oleh Presiden Prabowo di tengah bara demonstrasi yang berujung ricuh bukanlah langkah yang bisa dipandang remeh. Namun, pertanyaan yang muncul adalah *mengapa ormas Islam yang dipanggil pertama?* Apakah negara kini menggantungkan legitimasi sosial dan moralnya pada kekuatan agama, sementara saluran politik dan institusional kehilangan daya pengaruhnya?

Islam di Indonesia memang lebih dari sekadar agama. Ia telah menjelma menjadi ekosistem sosial, dari pesantren kecil di pelosok hingga organisasi

raksasa di ibu kota, yang membentuk jaringan komunikasi efektif.

Seorang kiai di desa seringkali lebih dipercaya daripada pejabat negara yang berpidato di layar kaca. Prabowo tentu menyadari, negara bisa memerintah, tapi ulama bisa menasihati. Perintah aparat bisa diabaikan, tapi suara dari mimbar Jumat bisa menembus hati umat.

Namun, di sinilah letak kritiknya. Ketika negara harus 'meminjam' suara ormas Islam untuk meredam amarah rakyat, bukankah itu menandakan krisis legitimasi politik?

Seruan pemerintah agar masyarakat tidak anarkis terdengar formalitas



foto: presiden.go.id

belaka. Sebaliknya, ketika ulama menyebut kekerasan bertentangan dengan Islam *rahmatan lil 'alamin*, barulah pesan itu dianggap berbobot. Negara membutuhkan legitimasi moral dari agama, karena instruksi politiknya sendiri dianggap tumpul.

### Ormas Islam di Persimpangan

Sejarah memang mencatat peran krusial ormas Islam dalam menjaga bangsa dari kehancuran. Resolusi Jihad NU tahun 1945 mengubah ketakutan rakyat menjadi energi perlawanan. Krisis 1998, NU dan Muhammadiyah menjadi jangkar moral agar bangsa tidak karam di lautan amarah.

Kini, skenario serupa kembali hadir. Rakyat marah atas arogansi DPR yang menambah tunjangan di tengah penderitaan, dan tragedi Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas terlindas rantis Brimob, menjadi simbol negara yang melukai rakyatnya sendiri.

Dalam situasi ini, ormas Islam lagi-lagi dipanggil untuk meredam bara.

Tetapi ada risiko besar, ormas yang seharusnya menjadi penyejuk bisa terjebak sebagai alat legitimasi politik kekuasaan. Ketika doa damai dijadikan pengganti keadilan, saat itulah suara moral berubah menjadi peredam kritik.

### Belajar dari Sejarah, Jangan Mengulang

Dari sejarah kita belajar bahwa ormas Islam memang lentera, tetapi cahaya itu tidak boleh dipaksa untuk menyinari jalur kekuasaan semata. Resolusi Jihad lahir dari dorongan moral membela tanah air, bukan dari pesanan elite politik. Seruan damai Gus Dur dan Muhammadiyah di 1998 muncul untuk menjaga rakyat, bukan untuk mengamankan kursi penguasa.

Hari ini, bangsa kembali berada di persimpangan. Pertanyaannya, apakah ormas Islam akan kembali menjadi penuntun jalan bangsa, atau justru terjebak menjadi tameng negara yang gagal menghadirkan keadilan?

Rizky Zulkarnain



IKUTI TERUS  
DISKUSI PUBLIK BERBAGAI TOPIK TERKINI DAN MENARIK  
HANYA DI:

# aktual forum

Dialog Publik yang digelar setiap bulan secara hybrid (online dan offline)  
di Channel YouTube aktualforum dan Cafe Warung Aceh Garuda (WAG)

Kolaborasi: 813-1019-7365

**MEMBEDAH PASAL KRUSIAL DI RKUHP**

• Komjen Pol Oegroseno (Mantan Wakapolt)

• Muhammad Isnur (ketua YLBHI)

• Ifit (Ketua ICJR)

aktual.com | aktual forum

TERANGKAT TERPERCAYA

aktualOfficial • aktual.com • Aktual Forum • aktual.com

**KOCOK ULANG KABINET PRABOWO**

**5 MENIT LAYAK DIRESKUSI**

Nailul Huda (Direktur Ekonomi Cellos)

Muhammad Hojin (Program Pusat, Puspol)

aktual.com | aktual forum

TERANGKAT TERPERCAYA





Saksikan dan Ikuti Terus  
Channel YouTube

# aktualforum



Mengupas Berbagai Isu Terhangat dan Menjadi Perhatian Publik

**aktual.com**  
TERHANGAT TERPERCAYA

Partnership/kolaborasi: 081310197365